



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/Pansel-CPNS/MA/VI/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (daftar terlampir).

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENETAPAN KEBUTUHAN				JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM	
1	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim) *)	S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah / S-1 Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah / S-1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah / S-1 Jinayah Siyasah / S-1 Siyasah / S-1 Siyasah Jinayah / S-1 Muamalah / S-1 Syariah / S-1 Perbandingan Mazhab Dan Hukum	278	0	3	1259	1540
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 Ekonomi / S-1 Sosial **) / S-1 Administrasi Negara / S-1 Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik	56	10	2	235	303
3	Pengelola Perkara	D-III Administrasi ***)	0	48	3	1141	1192
4	Pengelola Barang Milik Negara	D-III Akuntansi / D-III Manajemen Aset / D-III Akuntansi Komputer / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik	0	9	2	291	302
JUMLAH TOTAL			334	67	10	2926	3337

*) jabatan Analis Perkara Peradilan dialokasikan untuk mengikuti seleksi Calon Hakim, bagi yang tidak lulus seleksi Calon Hakim tetap dalam jabatan Analis Perkara Peradilan;

**) kualifikasi pendidikan S-1 Sosial, kecuali program studi/jurusan Psikologi dan Kriminologi;

***) kualifikasi pendidikan D-III Administrasi, kecuali program studi/jurusan Administrasi hotel/perhotelan, Administrasi Rekam Medik, Administrasi Kebijakan Kesehatan, Administrasi Logistik, Administrasi Perekam Medis dan Kesehatan, Administrasi Kepelabuhan, Administrasi Perhubungan Udara dan Administrasi Pertanian.

III. KRITERIA PELAMAR

- A. Penetapan Kebutuhan Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
- B. Penetapan Kebutuhan Khusus terdiri dari:
 1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude*.
 - a. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul serta Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai;
 - b. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama.
 2. Penyandang Disabilitas merupakan pelamar yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar;
 3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku.

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh wilayah Indonesia;
9. Pelamar merupakan lulusan:
 - a. Jenis Penetapan Kebutuhan Umum, Penetapan Kebutuhan Khusus (Disabilitas dan Putra/Putri Papua/Papua Barat)
 - 1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dari Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
 - 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0.
 - b. Jenis Penetapan Kebutuhan Khusus *Cumlaude*
 - 1) Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "Dengan Pujian"/*cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai;
 - 2) Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama.
10. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
11. Bagi Pelamar Jabatan Analis Perkara Peradilan wajib memiliki sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau International English Language Testing System (IELTS) paling rendah 5.0 (lima koma nol);
12. Bersedia mengabdi pada Mahkamah Agung dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **30 Juni 2021** dan ditutup pada tanggal **21 Juli 2021** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana di atas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto (selfie untuk pengenal wajah) dan upload KTP cetak Kartu Informasi Akun;
3. Selanjutnya pelamar kembali login ke portal di atas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, pelamar memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia;
4. Apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan scan dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar jenis Penetapan Kebutuhan Umum dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III.
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
 - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
 - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
 - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
 - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
 - 8) Bagi pelamar penyandang disabilitas:
 - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
 - b. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
 2. Pelamar Jenis Penetapan Kebutuhan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format

- surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>;
- 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
 - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan dilamar yang mencantumkan keterangan lulus "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
 - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - 4) Transkrip nilai asli yang menyatakan predikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
 - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
 - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
 - 8) Bagi pelamar penyandang disabilitas:
 - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
 - b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan "Dengan Pujian"/*Cumlaude*, jika tidak ada maka wajib melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
 - c. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
3. Pelamar Jenis Penetapan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III.
- a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
 - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
 - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
 - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
 - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
 - 8) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

- 9) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
 - b. Pelamar yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
4. Pelamar Jenis Penetapan Kebutuhan Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan dan Diploma III/D-III.
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
 - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
 - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
 - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
 - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
 - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
 - 8) Akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - 9) Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu;
 - 10) Bagi pelamar penyandang disabilitas:
 - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
5. Pendaftaran online dan unggah dokumen dilakukan mulai tanggal **30 Juni s.d. 21 Juli 2021** melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi:
 - 1) Verifikasi dokumen;
 - 2) Verifikasi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan kesesuaian jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video yang

- menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
- b. **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%** menggunakan Computer Assisted Test (CAT);
 - c. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%**
 - 1) Jabatan Analis Perkara Peradilan menggunakan:
 - a) Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50% (dari nilai keseluruhan SKB);
 - b) Wawancara dengan bobot 30% (dari nilai keseluruhan SKB);
 - c) Tes Kemampuan Bahasa Inggris dengan bobot 20% (dari nilai keseluruhan SKB).
 - 2) Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelola Perkara dan Pengelola Barang Milik Negara menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 100% (dari nilai keseluruhan SKB).
 2. Lokasi pelaksanaan tahapan SKD dilaksanakan pada **35 (tiga puluh lima)** wilayah di Indonesia;
 3. Lokasi pelaksanaan tahapan SKB akan diberitahukan lebih lanjut dengan pengumuman tersendiri melalui laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>.

VII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL *)
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	09 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
9.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d 1 November 2021
10.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
11.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
13.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
14.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
16.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
17.	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

*) Jika terdapat perubahan jadwal akan diberitahukan melalui laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>

VIII. KETENTUAN KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi
 - a. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar;
 - b. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
 - c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> untuk dipergunakan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
2. Seleksi Kompetensi Dasar
 - a. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi penetapan kebutuhan yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis penetapan kebutuhan yang sama dapat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana pada kriteria 2.b di atas, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
4. Kelulusan Akhir
Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

IX. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan;
3. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai SK CPNS dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
11. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi *helpdesk* melalui :
 - a) Telepon : 0877-7777-3510 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB;
 - b) e-mail : rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id;
 - c) WhatsApp : 0877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB;
 - d) Telegram : CPNS MAHKAMAH AGUNG 2021;
 - e) Facebook : Rekrutmen Cdns Mahkamah Agung;
 - f) Twitter : @CPNS_MA_RI; atau
 - g) Instagram : [rekrutmencpns.mahkamahagung/](https://www.instagram.com/rekrutmencpns.mahkamahagung/);
13. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI, dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.



DAFTAR PENETAPAN KEBUTUHAN CPNS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
1	KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI	0	30	0	0	30
2	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	3	0	8	0	11
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	0	12	0	0	12
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	0	10	0	0	10
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	0	10	0	0	10
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	3	0	0	0	3
7	MAHKAMAH SYARIYAH BLANGPIDIE	0	1	0	1	2
8	MAHKAMAH SYARIYAH KOTA SUBULUSSALAM	0	1	0	1	2
9	MAHKAMAH SYARIYAH SUKA MAKMUE	0	2	0	1	3
10	MAHKAMAH SYARIAH ACEH	1	2	1	1	5
11	MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH	1	2	1	1	5
12	MAHKAMAH SYARIAH BIEREUN	1	2	1	2	6
13	MAHKAMAH SYARIAH BLANGKAJEREN	0	2	0	1	3
14	MAHKAMAH SYARIAH CALANG	0	0	0	1	1
15	MAHKAMAH SYARIAH IDI	0	2	0	2	4
16	MAHKAMAH SYARIAH JANTHO	0	2	0	1	3
17	MAHKAMAH SYARIAH KUALA SIMPANG	0	1	0	1	2
18	MAHKAMAH SYARIAH KUTACANE	0	2	0	2	4
19	MAHKAMAH SYARIAH LANGSA	0	2	0	2	4
20	MAHKAMAH SYARIAH LHOK SEUMAWE	1	2	1	0	4
21	MAHKAMAH SYARIAH LHOK SUKON	0	3	0	2	5
22	MAHKAMAH SYARIAH MEULABOH	0	2	0	2	4
23	MAHKAMAH SYARIAH MEUREUDU	0	2	0	2	4
24	MAHKAMAH SYARIAH SABANG	0	2	0	1	3
25	MAHKAMAH SYARIAH SIGLI	1	3	0	2	6
26	MAHKAMAH SYARIAH SIMPANG TIGA REDELONG	0	2	0	1	3
27	MAHKAMAH SYARIAH SINABANG	0	2	0	1	3
28	MAHKAMAH SYARIAH SINGKEL	0	2	0	2	4
29	MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON	1	2	1	2	6
30	MAHKAMAH SYARIAH TAPAK TUAN	0	2	0	1	3
31	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	0	1	0	0	1
32	PENGADILAN MILITER UTAMA	0	0	0	2	2
33	PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN	0	0	0	2	2
34	PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA	0	0	0	2	2
35	PENGADILAN MILITER TINGGI - III SURABAYA	0	0	0	2	2
36	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	0	2	0	1	3
37	PENGADILAN AGAMA AMBON	1	2	1	1	5
38	PENGADILAN AGAMA AMPANA	0	2	0	1	3
39	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	1	2	1	0	4
40	PENGADILAN AGAMA AMURANG	0	2	0	2	4
41	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	0	2	0	2	4
42	PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	1	0	1	1	3
43	PENGADILAN AGAMA ARSO	0	2	0	0	2
44	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	0	1	0	1	2
45	PENGADILAN AGAMA BADUNG	0	1	0	1	2
46	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	0	2	0	2	4
47	PENGADILAN AGAMA BALIGE	0	2	0	1	3
48	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	0	2	1	1	4
49	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	0	3	1	2	6
50	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	0	2	0	2	4
51	PENGADILAN AGAMA BANGIL	1	2	1	0	4
52	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	1	3	1	3	8
53	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	1	0	1	1	3
54	PENGADILAN AGAMA BANGKO	1	2	1	0	4
55	PENGADILAN AGAMA BANGLI	0	1	0	1	2
56	PENGADILAN AGAMA BANJAR	0	2	0	1	3
57	PENGADILAN AGAMA BANJAR BARU	0	1	0	1	2
58	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	0	1	1	1	3
59	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	1	1	0	1	3
60	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	0	2	0	2	4
61	PENGADILAN AGAMA BANTUL	1	0	1	1	3
62	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	1	2	1	2	6
63	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	1	3	1	2	7
64	PENGADILAN AGAMA BARABAI	1	2	1	2	6
65	PENGADILAN AGAMA BARRU	0	2	0	2	4
66	PENGADILAN AGAMA BATAM	1	2	1	1	5
67	PENGADILAN AGAMA BATANG	1	2	0	1	4
68	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	0	2	0	2	4

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
69	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	1	2	1	2	6
70	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	1	0	1	1	3
71	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	0	2	0	2	4
72	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	0	2	0	1	3
73	PENGADILAN AGAMA BEKASI	0	1	1	1	3
74	PENGADILAN AGAMA BELOPA	0	2	0	2	4
75	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	0	2	0	1	3
76	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	0	2	0	1	3
77	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	0	2	1	1	4
78	PENGADILAN AGAMA BIAK	0	2	0	0	2
79	PENGADILAN AGAMA BIMA	1	0	1	1	3
80	PENGADILAN AGAMA BINJAI	0	1	0	1	2
81	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	0	1	0	1	2
82	PENGADILAN AGAMA BITUNG	0	2	0	2	4
83	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	0	2	0	1	3
84	PENGADILAN AGAMA BLITAR	1	2	1	2	6
85	PENGADILAN AGAMA BLORA	1	0	1	1	3
86	PENGADILAN AGAMA BOGOR	0	3	1	2	6
87	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	1	2	1	1	5
88	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	0	2	0	1	3
89	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	1	2	1	2	6
90	PENGADILAN AGAMA BONTANG	0	2	0	2	4
91	PENGADILAN AGAMA BOROKO	0	1	0	1	2
92	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	1	1	0	1	3
93	PENGADILAN AGAMA BREBES	1	2	1	1	5
94	PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI	1	2	1	2	6
95	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	0	3	0	3	6
96	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	0	2	0	2	4
97	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	0	2	0	1	3
98	PENGADILAN AGAMA BUOL	0	2	0	2	4
99	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	1	3	0	3	7
100	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	1	2	1	1	5
101	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	1	3	1	3	8
102	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	0	2	0	1	3
103	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	0	3	1	3	7
104	PENGADILAN AGAMA CILACAP	1	2	1	1	5
105	PENGADILAN AGAMA CILEGON	0	2	0	1	3
106	PENGADILAN AGAMA CIREBON	0	2	1	1	4
107	PENGADILAN AGAMA CURUP	1	2	1	0	4
108	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	0	2	0	1	3
109	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	0	0	0	1	1
110	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	0	0	0	1	1
111	PENGADILAN AGAMA DEMAK	0	2	0	1	3
112	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	1	2	1	1	5
113	PENGADILAN AGAMA DEPOK	0	1	0	1	2
114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	1	3	1	2	7
115	PENGADILAN AGAMA DONGGALA	1	2	1	2	6
116	PENGADILAN AGAMA DUMAI	1	2	1	0	4
117	PENGADILAN AGAMA ENDE	0	2	0	2	4
118	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	0	2	0	2	4
119	PENGADILAN AGAMA FAK-FAK	0	2	0	0	2
120	PENGADILAN AGAMA GARUT	1	2	1	2	6
121	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	0	1	0	1	2
122	PENGADILAN AGAMA GIANJAR	0	0	0	1	1
123	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	0	2	0	1	3
124	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	1	2	1	2	6
125	PENGADILAN AGAMA GRESIK	0	2	0	3	5
126	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	0	1	0	1	2
127	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	1	2	1	2	6
128	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	1	2	1	2	6
129	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	0	2	0	1	3
130	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	0	3	0	3	6
131	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	0	3	0	2	5
132	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	0	1	0	1	2
133	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	0	2	0	1	3
134	PENGADILAN AGAMA JAMBI	0	3	1	2	6
135	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	0	2	0	0	2
136	PENGADILAN AGAMA JEMBER	1	3	0	3	7
137	PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	0	1	0	2	3
138	PENGADILAN AGAMA JEPARA	1	1	0	1	3

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
139	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	1	3	1	2	7
140	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	0	2	0	2	4
141	PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI	0	2	1	2	5
142	PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN	0	2	0	2	4
143	PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG	1	3	1	2	7
144	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	0	1	0	1	2
145	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	0	2	0	0	2
146	PENGADILAN AGAMA KAJEN	1	2	1	0	4
147	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	0	2	0	2	4
148	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	1	3	1	2	7
149	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	0	2	0	1	3
150	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	0	2	0	1	3
151	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	1	1	0	1	3
152	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	0	1	0	1	2
153	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	0	3	1	2	6
154	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	0	1	0	1	2
155	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	1	2	0	3	6
156	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	0	2	0	2	4
157	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	0	2	0	1	3
158	PENGADILAN AGAMA KENDAL	0	2	1	1	4
159	PENGADILAN AGAMA KENDARI	1	3	1	2	7
160	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	0	2	0	1	3
161	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	0	1	0	1	2
162	PENGADILAN AGAMA KISARAN	1	2	0	3	6
163	PENGADILAN AGAMA KLATEN	0	2	0	1	3
164	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	0	1	0	1	2
165	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	0	2	0	2	4
166	PENGADILAN AGAMA KOTA BARU	0	2	0	2	4
167	PENGADILAN AGAMA KOTA BUMI	0	3	0	2	5
168	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	0	2	0	1	3
169	PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI	0	2	0	1	3
170	PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN	0	2	0	2	4
171	PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	0	3	1	2	6
172	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	0	2	0	2	4
173	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	0	3	0	2	5
174	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	1	2	1	0	4
175	PENGADILAN AGAMA KOTOBARU	0	2	0	2	4
176	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	1	3	1	2	7
177	PENGADILAN AGAMA KRUI	0	2	0	1	3
178	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	0	2	0	2	4
179	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	0	1	0	1	2
180	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	0	1	0	1	2
181	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	0	1	0	1	2
182	PENGADILAN AGAMA KUDUS	1	0	1	1	3
183	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	1	2	0	1	4
184	PENGADILAN AGAMA KUPANG	1	2	1	2	6
185	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	0	2	0	1	3
186	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	0	2	0	1	3
187	PENGADILAN AGAMA LABUHA	0	0	0	1	1
188	PENGADILAN AGAMA LAHAT	1	2	1	1	5
189	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	1	3	1	2	7
190	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	0	2	0	1	3
191	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	0	2	0	1	3
192	PENGADILAN AGAMA LEBONG	0	1	0	1	2
193	PENGADILAN AGAMA LEVOLEBA	0	1	0	1	2
194	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	1	2	1	2	6
195	PENGADILAN AGAMA LOLAK	0	1	0	1	2
196	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	0	2	0	2	4
197	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	1	2	1	0	4
198	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	1	3	1	2	7
199	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	0	2	0	2	4
200	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	1	3	1	2	7
201	PENGADILAN AGAMA LUWUK	1	2	1	2	6
202	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	0	1	0	1	2
203	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	1	3	0	2	6
204	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	1	0	1	1	3
205	PENGADILAN AGAMA MAJENE	0	2	0	2	4
206	PENGADILAN AGAMA MAKALE	0	2	0	1	3
207	PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	0	2	1	1	4
208	PENGADILAN AGAMA MALILI	0	1	0	1	2

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
209	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	1	2	1	2	6
210	PENGADILAN AGAMA MANADO	1	2	1	2	6
211	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	0	2	0	2	4
212	PENGADILAN AGAMA MANNA	0	1	0	1	2
213	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	0	2	0	0	2
214	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	0	2	0	1	3
215	PENGADILAN AGAMA MARISA	0	1	0	1	2
216	PENGADILAN AGAMA MAROS	1	0	1	1	3
217	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	2	5	2	2	11
218	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	0	2	0	2	4
219	PENGADILAN AGAMA MASOHI	0	2	0	1	3
220	PENGADILAN AGAMA MATARAM	1	2	1	2	6
221	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	0	2	0	1	3
222	PENGADILAN AGAMA MEDAN	1	2	1	1	5
223	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	1	2	1	1	5
224	PENGADILAN AGAMA MENTOK	0	2	0	1	3
225	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	0	2	0	0	2
226	PENGADILAN AGAMA MESUJI	0	1	0	1	2
227	PENGADILAN AGAMA METRO	1	0	1	1	3
228	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	0	2	0	0	2
229	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	1	2	0	2	5
230	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	1	0	1	1	3
231	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	1	3	0	3	7
232	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	0	2	0	2	4
233	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	0	1	0	1	2
234	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	0	1	0	1	2
235	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	0	2	0	2	4
236	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	0	1	0	1	2
237	PENGADILAN AGAMA MUARO BUNGO	0	1	0	1	2
238	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	0	2	0	1	3
239	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	0	2	0	2	4
240	PENGADILAN AGAMA NABIRE	0	2	0	0	2
241	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	0	0	0	1	1
242	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	0	1	0	1	2
243	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	0	1	0	1	2
244	PENGADILAN AGAMA NATUNA	0	2	0	1	3
245	PENGADILAN AGAMA NEGARA	0	4	0	2	6
246	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	0	2	0	1	3
247	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	0	2	0	2	4
248	PENGADILAN AGAMA NGAWI	0	3	0	2	5
249	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	0	2	0	2	4
250	PENGADILAN AGAMA PACITAN	1	2	0	2	5
251	PENGADILAN AGAMA PADANG	0	3	1	2	6
252	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	0	2	0	2	4
253	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	0	2	0	2	4
254	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	0	1	0	0	1
255	PENGADILAN AGAMA PAINAI	0	2	0	0	2
256	PENGADILAN AGAMA PAINAN	0	2	0	2	4
257	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	0	2	1	2	5
258	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	0	1	0	1	2
259	PENGADILAN AGAMA PALOPO	0	1	0	1	2
260	PENGADILAN AGAMA PALU	1	2	1	2	6
261	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	1	2	0	1	4
262	PENGADILAN AGAMA PANDAN	0	1	0	1	2
263	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	0	3	0	2	5
264	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	0	2	0	1	3
265	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	0	1	0	1	2
266	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	0	1	0	1	2
267	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	1	2	1	2	6
268	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	0	2	0	1	3
269	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	0	2	0	2	4
270	PENGADILAN AGAMA PARE-PARE	1	2	1	2	6
271	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	1	2	1	2	6
272	PENGADILAN AGAMA PARIGI	0	2	0	2	4
273	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	0	1	0	1	2
274	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	0	2	0	2	4
275	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	0	2	0	2	4
276	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	0	3	0	3	6
277	PENGADILAN AGAMA PATI	1	3	1	2	7
278	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	1	2	1	0	4

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
279	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	0	2	0	1	3
280	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	0	1	1	1	3
281	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	1	2	1	2	6
282	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	0	2	1	1	4
283	PENGADILAN AGAMA PEMATANG Siantar	0	2	0	2	4
284	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	0	1	0	1	2
285	PENGADILAN AGAMA PINRANG	0	2	1	3	6
286	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	0	3	1	3	7
287	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	1	3	0	2	6
288	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	0	2	1	1	4
289	PENGADILAN AGAMA POSO	0	2	0	2	4
290	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	0	1	0	1	2
291	PENGADILAN AGAMA PRAYA	1	2	1	2	6
292	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	0	1	0	1	2
293	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	1	2	1	1	5
294	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	0	1	0	1	2
295	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	0	2	0	1	3
296	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	1	2	1	1	5
297	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	1	3	0	2	6
298	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	1	0	1	1	3
299	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	0	3	1	2	6
300	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	1	0	0	1	2
301	PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU	0	2	0	1	3
302	PENGADILAN AGAMA RAHA	0	2	0	2	4
303	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	0	3	0	2	5
304	PENGADILAN AGAMA RANTAU	0	2	0	2	4
305	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	0	2	1	3	6
306	PENGADILAN AGAMA REMBANG	1	2	1	2	6
307	PENGADILAN AGAMA RENGAT	1	2	1	0	4
308	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	0	1	0	1	2
309	PENGADILAN AGAMA RUTENG	0	2	0	2	4
310	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	1	3	0	2	6
311	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	0	3	1	3	7
312	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	1	3	1	2	7
313	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	1	2	0	2	5
314	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	0	2	0	2	4
315	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	0	2	0	2	4
316	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	0	2	0	1	3
317	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	0	1	0	1	2
318	PENGADILAN AGAMA SAWAH LUNTO	0	2	0	2	4
319	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	0	1	0	1	2
320	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	0	2	0	1	3
321	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	0	2	0	1	3
322	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	0	2	0	2	4
323	PENGADILAN AGAMA SELONG	1	0	1	1	3
324	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	0	2	0	1	3
325	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	0	1	0	1	2
326	PENGADILAN AGAMA SENGETI	1	0	1	1	3
327	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	1	3	1	3	8
328	PENGADILAN AGAMA SENTANI	0	2	0	0	2
329	PENGADILAN AGAMA SERANG	1	3	1	2	7
330	PENGADILAN AGAMA SERUI	0	2	0	0	2
331	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	0	1	0	1	2
332	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	0	2	0	1	3
333	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	0	2	0	2	4
334	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	0	1	0	1	2
335	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	0	2	1	2	5
336	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	0	2	0	2	4
337	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	0	3	0	3	6
338	PENGADILAN AGAMA SINDENRENG RAPPANG	0	2	0	2	4
339	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	0	0	0	1	1
340	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	0	1	0	1	2
341	PENGADILAN AGAMA SINJAI	0	2	0	2	4
342	PENGADILAN AGAMA SINTANG	0	2	0	1	3
343	PENGADILAN AGAMA SITUBONDOK	1	2	1	3	7
344	PENGADILAN AGAMA SLAWI	1	0	1	1	3
345	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	0	2	1	1	4
346	PENGADILAN AGAMA SO'E	0	2	0	2	4
347	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	0	2	0	1	3
348	PENGADILAN AGAMA SOLOK	0	2	0	2	4

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
349	PENGADILAN AGAMA SOREANG	0	2	0	1	3
350	PENGADILAN AGAMA SORONG	0	2	0	0	2
351	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	1	0	1	1	3
352	PENGADILAN AGAMA STABAT	1	2	1	0	4
353	PENGADILAN AGAMA SUBANG	1	2	1	1	5
354	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	1	2	1	1	5
355	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	0	2	0	1	3
356	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	0	1	0	1	2
357	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	0	1	0	1	2
358	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR	1	2	1	0	4
359	PENGADILAN AGAMA SUMBER	1	3	0	3	7
360	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	1	3	0	2	6
361	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	1	2	0	2	5
362	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	0	1	0	1	2
363	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	0	1	0	1	2
364	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	1	2	1	0	4
365	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	1	2	1	0	4
366	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	0	3	1	0	4
367	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	0	1	0	1	2
368	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	0	1	0	1	2
369	PENGADILAN AGAMA TABANAN	0	1	0	1	2
370	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	0	2	0	2	4
371	PENGADILAN AGAMA TAIS	0	2	0	1	3
372	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	0	2	0	2	4
373	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	0	2	0	1	3
374	PENGADILAN AGAMA TALU	0	2	0	2	4
375	PENGADILAN AGAMA TAMUYANG LAYANG	0	1	0	1	2
376	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	0	2	0	1	3
377	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	0	3	1	2	6
378	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	1	2	1	0	4
379	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	0	0	0	1	1
380	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	0	1	0	1	2
381	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	0	2	0	1	3
382	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	1	2	1	1	5
383	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	1	2	1	1	5
384	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB	0	2	0	1	3
385	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	1	2	1	0	4
386	PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG	0	3	1	2	6
387	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	0	2	0	2	4
388	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	0	2	0	2	4
389	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	1	0	1	1	3
390	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	0	1	0	1	2
391	PENGADILAN AGAMA TEGAL	1	1	0	1	3
392	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	0	1	0	1	2
393	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	0	1	0	1	2
394	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	0	3	0	2	5
395	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	1	2	1	1	5
396	PENGADILAN AGAMA TEREMPA	0	2	0	1	3
397	PENGADILAN AGAMA TERNATE	1	1	1	1	4
398	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	0	3	1	2	6
399	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	0	2	0	2	4
400	PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI	0	2	0	2	4
401	PENGADILAN AGAMA TONDANO	0	2	0	1	3
402	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	1	2	0	2	5
403	PENGADILAN AGAMA TUAL	0	2	0	1	3
404	PENGADILAN AGAMA TUBAN	1	1	1	2	5
405	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	0	1	0	1	2
406	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	0	1	0	1	2
407	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	0	3	1	2	6
408	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	0	1	0	1	2
409	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	0	2	0	1	3
410	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	0	2	0	2	4
411	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	0	2	0	1	3
412	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	0	2	0	1	3
413	PENGADILAN AGAMA WAMENA	0	2	0	0	2
414	PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI	0	1	0	1	2
415	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	1	2	1	3	7
416	PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG	1	2	1	2	6
417	PENGADILAN AGAMA WATES	1	0	1	1	3
418	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	1	3	1	2	7

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
419	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	1	2	1	2	6
420	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	1	2	1	1	5
421	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	0	1	1	1	3
422	PENGADILAN MILITER I - 01 BANDA ACEH	0	0	0	2	2
423	PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN	0	0	0	2	2
424	PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG	0	0	0	2	2
425	PENGADILAN MILITER I - 04 PALEMBANG	0	0	0	2	2
426	PENGADILAN MILITER I - 05 PONTIANAK	0	0	0	2	2
427	PENGADILAN MILITER I - 06 BANJARMASIN	0	0	0	2	2
428	PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN	0	0	0	2	2
429	PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA	0	0	0	2	2
430	PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG	0	0	0	2	2
431	PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG	0	0	0	2	2
432	PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA	0	0	0	2	2
433	PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA	0	0	0	2	2
434	PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN	0	0	0	2	2
435	PENGADILAN MILITER III - 14 DENPASAR	0	0	0	2	2
436	PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG	0	0	0	2	2
437	PENGADILAN MILITER III - 16 MAKASSAR	0	0	0	2	2
438	PENGADILAN MILITER III - 17 MANADO	0	0	0	2	2
439	PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON	0	0	0	2	2
440	PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA	0	0	0	2	2
441	PENGADILAN NEGERI AIRMANDIDI	0	2	0	2	4
442	PENGADILAN NEGERI AMBON	1	0	1	1	3
443	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	0	2	0	1	3
444	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	0	2	0	1	3
445	PENGADILAN NEGERI AMURANG	0	2	0	2	4
446	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	0	3	0	2	5
447	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	0	0	0	1	1
448	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	1	0	1	1	3
449	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	0	1	0	1	2
450	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	0	1	1	1	3
451	PENGADILAN NEGERI BALIGE	0	1	0	1	2
452	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	0	2	1	3	6
453	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	0	1	1	1	3
454	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	0	1	0	1	2
455	PENGADILAN NEGERI BANGIL	1	2	1	1	5
456	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	0	1	0	1	2
457	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	1	3	0	3	7
458	PENGADILAN NEGERI BANGKO	1	2	1	2	6
459	PENGADILAN NEGERI BANGLI	0	2	0	1	3
460	PENGADILAN NEGERI BANJAR	0	0	0	1	1
461	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	0	1	0	1	2
462	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	0	2	1	1	4
463	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	0	2	0	1	3
464	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	0	3	0	2	5
465	PENGADILAN NEGERI BANTUL	1	2	1	1	5
466	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	0	2	0	1	3
467	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	1	3	1	1	6
468	PENGADILAN NEGERI BARABAI	0	1	0	1	2
469	PENGADILAN NEGERI BARU	0	2	0	2	4
470	PENGADILAN NEGERI BATAM	1	3	0	4	8
471	PENGADILAN NEGERI BATANG	0	1	0	1	2
472	PENGADILAN NEGERI BATU LICIN	0	1	0	1	2
473	PENGADILAN NEGERI BATORAJA	0	3	0	2	5
474	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	0	2	0	2	4
475	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	1	1	1	1	4
476	PENGADILAN NEGERI BEKASI	0	1	0	1	2
477	PENGADILAN NEGERI BELOPA	0	1	0	1	2
478	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	0	3	0	4	7
479	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	0	2	0	1	3
480	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	0	1	1	1	3
481	PENGADILAN NEGERI BIAK	0	1	0	1	2
482	PENGADILAN NEGERI BIEREUN	0	2	0	1	3
483	PENGADILAN NEGERI BINJAI	1	1	1	1	4
484	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	0	1	0	1	2
485	PENGADILAN NEGERI BITUNG	1	2	1	2	6
486	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	0	2	0	2	4
487	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	0	2	0	2	4
488	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	0	1	0	1	2

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
489	PENGADILAN NEGERI BLITAR	0	2	0	3	5
490	PENGADILAN NEGERI BLORA	0	2	1	1	4
491	PENGADILAN NEGERI BOBONG	0	1	0	1	2
492	PENGADILAN NEGERI BOGOR	0	1	0	1	2
493	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	1	2	0	1	4
494	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	1	2	1	1	5
495	PENGADILAN NEGERI BONTANG	0	2	0	1	3
496	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	1	1	1	1	4
497	PENGADILAN NEGERI BREBES	1	1	1	1	4
498	PENGADILAN NEGERI BUKIT TINGGI	1	2	1	2	6
499	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	1	2	1	2	6
500	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	0	2	0	1	3
501	PENGADILAN NEGERI BUOL	0	3	0	2	5
502	PENGADILAN NEGERI CALANG	0	2	0	2	4
503	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	1	2	1	1	5
504	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	1	0	1	1	3
505	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	1	2	1	1	5
506	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	0	2	1	1	4
507	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	0	2	0	2	4
508	PENGADILAN NEGERI CILACAP	0	3	1	2	6
509	PENGADILAN NEGERI CIREBON	1	0	0	1	2
510	PENGADILAN NEGERI CURUP	1	2	1	0	4
511	PENGADILAN NEGERI DATARAN HONIPOPU	0	1	0	1	2
512	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	0	1	0	1	2
513	PENGADILAN NEGERI DEMAK	0	0	0	1	1
514	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	1	1	1	1	4
515	PENGADILAN NEGERI DEPOK	0	0	0	1	1
516	PENGADILAN NEGERI DOBO	0	1	0	1	2
517	PENGADILAN NEGERI DOMPU	0	1	0	1	2
518	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	0	3	0	2	5
519	PENGADILAN NEGERI DUMAI	1	2	1	2	6
520	PENGADILAN NEGERI ENDE	0	1	0	1	2
521	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	0	2	0	2	4
522	PENGADILAN NEGERI FAK-FAK	0	2	0	1	3
523	PENGADILAN NEGERI GARUT	0	1	1	1	3
524	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	0	1	0	1	2
525	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	1	2	1	2	6
526	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	1	1	1	1	4
527	PENGADILAN NEGERI GRESIK	0	3	1	3	7
528	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	1	1	1	1	4
529	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	0	1	0	1	2
530	PENGADILAN NEGERI IDI	0	2	0	2	4
531	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	1	1	1	1	4
532	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	0	4	0	2	6
533	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	0	4	0	3	7
534	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	0	1	0	1	2
535	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	0	3	0	3	6
536	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	0	1	0	1	2
537	PENGADILAN NEGERI JAMBI	1	3	1	2	7
538	PENGADILAN NEGERI JANTHO	0	2	0	1	3
539	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	1	2	1	0	4
540	PENGADILAN NEGERI JEMBER	1	2	0	1	4
541	PENGADILAN NEGERI JENEPOINTO	0	2	0	2	4
542	PENGADILAN NEGERI JEPARA	1	2	0	1	4
543	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	1	1	0	1	3
544	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	1	3	1	3	8
545	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	0	2	0	1	3
546	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	1	0	1	1	3
547	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	0	1	0	1	2
548	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	0	0	0	1	1
549	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	0	2	0	1	3
550	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	1	1	1	1	4
551	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	1	3	0	3	7
552	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	0	2	0	1	3
553	PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG	0	3	0	2	5
554	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	1	1	1	1	4
555	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	1	3	0	2	6
556	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	0	2	0	1	3
557	PENGADILAN NEGERI KENDAL	1	1	0	1	3
558	PENGADILAN NEGERI KENDARI	1	3	1	2	7

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
559	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	0	2	0	1	3
560	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	0	1	0	1	2
561	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	0	1	0	1	2
562	PENGADILAN NEGERI KISARAN	1	2	1	0	4
563	PENGADILAN NEGERI KLATEN	0	1	1	1	3
564	PENGADILAN NEGERI KOBA	0	1	0	1	2
565	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	1	0	1	1	3
566	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	0	2	0	1	3
567	PENGADILAN NEGERI KOTA BARU	0	2	0	1	3
568	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA	0	1	0	1	2
569	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	0	1	0	1	2
570	PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	0	2	0	1	3
571	PENGADILAN NEGERI KOTO BARU	0	3	0	2	5
572	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	1	0	1	1	3
573	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	0	2	0	1	3
574	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0	1	0	1	2
575	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	0	2	0	2	4
576	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	0	2	0	1	3
577	PENGADILAN NEGERI KUDUS	1	0	1	1	3
578	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	0	2	0	2	4
579	PENGADILAN NEGERI KUPANG	1	1	1	1	4
580	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	0	2	0	2	4
581	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	0	2	0	2	4
582	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	0	2	0	1	3
583	PENGADILAN NEGERI LABUHA	0	1	0	1	2
584	PENGADILAN NEGERI LAHAT	0	1	0	1	2
585	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	1	2	0	1	4
586	PENGADILAN NEGERI LANGSA	0	2	0	1	3
587	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	0	1	0	1	2
588	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	0	1	0	1	2
589	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	0	2	0	1	3
590	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	1	2	1	2	6
591	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	1	2	1	1	5
592	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	1	0	1	1	3
593	PENGADILAN NEGERI LIWA	0	2	0	1	3
594	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	0	1	0	1	2
595	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU	1	0	1	1	3
596	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	1	2	0	4	7
597	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	0	2	0	2	4
598	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	1	0	1	1	3
599	PENGADILAN NEGERI LUWUK	0	2	0	1	3
600	PENGADILAN NEGERI MADIUN	1	1	0	1	3
601	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	0	1	0	1	2
602	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	0	3	0	3	6
603	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	0	2	0	1	3
604	PENGADILAN NEGERI MAJENE	0	2	0	2	4
605	PENGADILAN NEGERI MAKALE	1	2	1	2	6
606	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	0	3	0	3	6
607	PENGADILAN NEGERI MALANG	0	2	1	0	3
608	PENGADILAN NEGERI MALILI	0	2	0	2	4
609	PENGADILAN NEGERI MALINAU	0	3	0	2	5
610	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	1	2	1	2	6
611	PENGADILAN NEGERI MANADO	1	3	1	0	5
612	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	0	2	0	2	4
613	PENGADILAN NEGERI MANNA	0	1	0	1	2
614	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	1	0	1	1	3
615	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	0	2	0	1	3
616	PENGADILAN NEGERI MARISA	0	1	0	1	2
617	PENGADILAN NEGERI MAROS	1	0	1	1	3
618	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	1	0	1	1	3
619	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	0	2	0	2	4
620	PENGADILAN NEGERI MASOHI	0	1	0	1	2
621	PENGADILAN NEGERI MATARAM	1	1	1	1	4
622	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	0	0	0	1	1
623	PENGADILAN NEGERI MEDAN	0	1	0	1	2
624	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	0	2	0	1	3
625	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	0	2	0	1	3
626	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	0	2	0	2	4
627	PENGADILAN NEGERI MENTOK	0	1	0	1	2
628	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	0	1	0	1	2

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
629	PENGADILAN NEGERI METRO	1	2	1	0	4
630	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	0	2	0	2	4
631	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	0	0	0	1	1
632	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	1	3	0	0	4
633	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	0	2	0	2	4
634	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	0	1	0	1	2
635	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	0	1	0	1	2
636	PENGADILAN NEGERI MUARO	0	1	0	1	2
637	PENGADILAN NEGERI MUARO BUNGO	0	3	0	2	5
638	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	0	1	0	1	2
639	PENGADILAN NEGERI MUNGKID	1	1	0	1	3
640	PENGADILAN NEGERI NABIRE	0	1	0	1	2
641	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	0	1	0	1	2
642	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	0	1	0	1	2
643	PENGADILAN NEGERI NEGARA	0	2	0	2	4
644	PENGADILAN NEGERI NGABANG	0	2	0	1	3
645	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	1	0	0	1	2
646	PENGADILAN NEGERI NGAWI	0	2	0	1	3
647	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	0	3	0	2	5
648	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	0	2	0	1	3
649	PENGADILAN NEGERI PACITAN	0	0	0	1	1
650	PENGADILAN NEGERI PADANG	0	4	1	1	6
651	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	0	3	0	2	5
652	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	1	2	1	0	4
653	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	0	2	0	1	3
654	PENGADILAN NEGERI PAINAN	0	3	0	2	5
655	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	0	1	1	1	3
656	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	0	2	0	1	3
657	PENGADILAN NEGERI PALOPO	1	2	1	0	4
658	PENGADILAN NEGERI PALU	1	1	1	1	4
659	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	1	1	0	1	3
660	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	0	2	0	2	4
661	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	0	3	0	3	6
662	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	0	1	1	1	3
663	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	0	1	0	1	2
664	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1	0	1	1	3
665	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	0	2	0	2	4
666	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	1	2	1	2	6
667	PENGADILAN NEGERI PARIGI	0	3	0	2	5
668	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	0	1	0	1	2
669	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	0	3	0	2	5
670	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	0	2	0	1	3
671	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	0	2	0	2	4
672	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAYAN	0	2	0	3	5
673	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	0	0	0	1	1
674	PENGADILAN NEGERI PATI	0	1	1	1	3
675	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	0	2	0	2	4
676	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	1	1	1	1	4
677	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	0	4	1	1	6
678	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	0	2	0	1	3
679	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	0	2	0	1	3
680	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	1	0	0	1	2
681	PENGADILAN NEGERI PEMATANG Siantar	1	0	1	1	3
682	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	0	1	0	1	2
683	PENGADILAN NEGERI PINRANG	0	2	0	2	4
684	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	0	2	0	2	4
685	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	0	1	1	0	2
686	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	0	3	1	2	6
687	PENGADILAN NEGERI POSO	1	2	1	0	4
688	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	0	2	0	1	3
689	PENGADILAN NEGERI PRAYA	0	1	0	1	2
690	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	0	2	0	1	3
691	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	0	1	0	1	2
692	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	0	1	0	1	2
693	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	1	2	0	1	4
694	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	1	1	0	1	3
695	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	1	1	0	1	3
696	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	1	2	0	3	6
697	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	1	1	0	1	3
698	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	0	1	0	1	2

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
699	PENGADILAN NEGERI RABA BIMA	1	0	1	1	3
700	PENGADILAN NEGERI RAHA	0	2	0	1	3
701	PENGADILAN NEGERI RANAI	0	3	0	2	5
702	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	0	1	0	1	2
703	PENGADILAN NEGERI RANTAU	0	1	0	1	2
704	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	1	0	1	1	3
705	PENGADILAN NEGERI REMBANG	0	1	0	1	2
706	PENGADILAN NEGERI RENGAT	0	2	0	2	4
707	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	0	3	0	2	5
708	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	0	2	0	1	3
709	PENGADILAN NEGERI RUTENG	0	2	0	1	3
710	PENGADILAN NEGERI SABANG	0	3	0	2	5
711	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	1	1	0	1	3
712	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	0	3	1	2	6
713	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	0	2	0	1	3
714	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	0	1	0	1	2
715	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	0	3	1	3	7
716	PENGADILAN NEGERI SANANA	0	1	0	1	2
717	PENGADILAN NEGERI SANGATA	0	3	0	2	5
718	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	0	1	0	1	2
719	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	0	2	0	2	4
720	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	0	2	0	1	3
721	PENGADILAN NEGERI SAWAH LUNTO	0	2	0	2	4
722	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	0	2	0	1	3
723	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	0	2	0	1	3
724	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	0	2	0	1	3
725	PENGADILAN NEGERI SELONG	1	2	1	2	6
726	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	0	3	0	2	5
727	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	0	2	0	1	3
728	PENGADILAN NEGERI SENGETI	0	2	0	2	4
729	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	1	2	1	0	4
730	PENGADILAN NEGERI SERANG	1	3	1	2	7
731	PENGADILAN NEGERI SERUI	0	1	0	1	2
732	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	0	3	0	2	5
733	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	0	2	0	2	4
734	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	0	1	0	1	2
735	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	0	1	0	1	2
736	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	0	2	0	1	3
737	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	0	3	0	1	4
738	PENGADILAN NEGERI SIGLI	0	2	0	1	3
739	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	1	0	1	1	3
740	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	0	2	0	1	3
741	PENGADILAN NEGERI SINABANG	0	1	0	1	2
742	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	1	2	1	1	5
743	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	1	0	1	1	3
744	PENGADILAN NEGERI SINGKIL	0	2	0	1	3
745	PENGADILAN NEGERI SINJAI	0	2	0	1	3
746	PENGADILAN NEGERI SINTANG	0	2	0	1	3
747	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	0	1	1	1	3
748	PENGADILAN NEGERI SLAWI	1	2	1	1	5
749	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	0	1	1	1	3
750	PENGADILAN NEGERI SO'E	0	1	0	1	2
751	PENGADILAN NEGERI SOA SIO	0	1	0	1	2
752	PENGADILAN NEGERI SOLOK	0	2	0	2	4
753	PENGADILAN NEGERI SORONG	1	0	1	1	3
754	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	1	2	1	2	6
755	PENGADILAN NEGERI STABAT	0	3	1	3	7
756	PENGADILAN NEGERI SUBANG	1	0	1	1	3
757	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	0	0	0	1	1
758	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	1	0	1	1	3
759	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	0	2	0	1	3
760	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	0	2	1	1	4
761	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	1	2	1	2	6
762	PENGADILAN NEGERI SUMBER (CIREBON)	1	2	1	1	5
763	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	1	0	1	1	3
764	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	0	1	0	1	2
765	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PUENUH	0	2	0	2	4
766	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	1	0	1	1	3
767	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	1	3	1	2	7
768	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	0	4	0	4	8

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
769	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	0	2	0	2	4
770	PENGADILAN NEGERI TABANAN	1	0	1	1	3
771	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	0	2	0	2	4
772	PENGADILAN NEGERI TAIS	0	2	0	1	3
773	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	0	3	0	2	5
774	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	0	1	0	1	2
775	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	0	2	0	1	3
776	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	0	2	0	1	3
777	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	0	1	0	1	2
778	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	0	2	0	1	3
779	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI	0	2	0	3	5
780	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	0	2	0	1	3
781	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	0	3	0	2	5
782	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	0	1	0	1	2
783	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	0	2	0	2	4
784	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	1	2	1	2	6
785	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	0	3	0	2	5
786	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	1	2	1	2	6
787	PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG	0	1	1	1	3
788	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	0	2	0	2	4
789	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	1	2	1	2	6
790	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	0	2	0	2	4
791	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	1	2	1	2	6
792	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	1	0	1	1	3
793	PENGADILAN NEGERI TEBO	0	2	0	2	4
794	PENGADILAN NEGERI TEGAL	1	1	1	1	4
795	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	0	1	0	1	2
796	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	1	1	1	1	4
797	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	0	2	0	2	4
798	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	1	2	1	2	6
799	PENGADILAN NEGERI TERNATE	1	2	1	1	5
800	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	0	2	0	1	3
801	PENGADILAN NEGERI TOBETO	0	2	0	1	3
802	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	0	0	0	1	1
803	PENGADILAN NEGERI TONDANO	0	3	1	3	7
804	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	0	1	0	1	2
805	PENGADILAN NEGERI TUAL	0	1	0	1	2
806	PENGADILAN NEGERI TUBAN	1	2	1	2	6
807	PENGADILAN NEGERI TUBEI	0	2	0	1	3
808	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	1	0	0	1	2
809	PENGADILAN NEGERI UNAAHA	0	2	0	1	3
810	PENGADILAN NEGERI UNGARAN	1	0	0	1	2
811	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	0	1	0	1	2
812	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	0	1	0	1	2
813	PENGADILAN NEGERI WAMENA	0	2	0	2	4
814	PENGADILAN NEGERI WANGIWANGI	0	1	0	1	2
815	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	1	2	1	2	6
816	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	0	2	0	2	4
817	PENGADILAN NEGERI WATES	1	1	1	1	4
818	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	1	2	0	1	4
819	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	0	1	0	1	2
820	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	1	1	0	1	3
821	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	0	1	1	1	3
822	PENGADILAN TUN AMBON	0	2	0	0	2
823	PENGADILAN TUN BANDA ACEH	0	1	0	0	1
824	PENGADILAN TUN BANDAR LAMPUNG	0	2	0	0	2
825	PENGADILAN TUN BANDUNG	0	1	0	0	1
826	PENGADILAN TUN BANJARMASIN	0	2	0	0	2
827	PENGADILAN TUN Bengkulu	0	1	0	0	1
828	PENGADILAN TUN DENPASAR	0	1	0	0	1
829	PENGADILAN TUN GORONTALO	0	3	1	1	5
830	PENGADILAN TUN JAKARTA	0	2	0	0	2
831	PENGADILAN TUN JAMBI	0	1	0	0	1
832	PENGADILAN TUN JAYAPURA	0	1	0	0	1
833	PENGADILAN TUN KENDARI	1	4	1	1	7
834	PENGADILAN TUN KUPANG	0	1	0	0	1
835	PENGADILAN TUN MAKASSAR	1	4	1	3	9
836	PENGADILAN TUN MANADO	1	2	1	1	5
837	PENGADILAN TUN MATARAM	0	1	0	0	1
838	PENGADILAN TUN MEDAN	0	2	0	0	2

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
839	PENGADILAN TUN PADANG	0	1	0	0	1
840	PENGADILAN TUN PALANGKARAYA	0	2	0	0	2
841	PENGADILAN TUN PALEMBANG	0	2	0	0	2
842	PENGADILAN TUN PALU	0	4	0	0	4
843	PENGADILAN TUN PANGKAL PINANG	0	1	0	0	1
844	PENGADILAN TUN PEKANBARU	0	1	0	0	1
845	PENGADILAN TUN PONTIANAK	0	3	0	0	3
846	PENGADILAN TUN SAMARINDA	0	2	0	0	2
847	PENGADILAN TUN SEMARANG	0	2	0	0	2
848	PENGADILAN TUN SERANG	0	2	0	0	2
849	PENGADILAN TUN SURABAYA	0	2	0	0	2
850	PENGADILAN TUN TANJUNG PINANG	0	2	0	0	2
851	PENGADILAN TUN YOGYAKARTA	0	1	0	0	1
852	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	1	0	1	1	3
853	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	1	1	0	1	3
854	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	0	1	1	1	3
855	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	1	1	0	1	3
856	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	1	1	0	1	3
857	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	0	1	1	1	3
858	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	1	1	0	1	3
859	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	1	1	1	1	4
860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	0	1	1	1	3
861	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	1	1	0	1	3
862	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	0	2	0	0	2
863	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	1	1	1	1	4
864	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	1	1	1	1	4
865	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	1	1	1	1	4
866	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	1	0	1	1	3
867	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1	1	1	1	4
868	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	1	1	0	1	3
869	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	1	1	0	1	3
870	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	1	1	1	1	4
871	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	1	1	0	1	3
872	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	1	1	1	1	4
873	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	1	1	0	1	3
874	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	1	1	0	1	3
875	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	1	1	1	1	4
876	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	0	1	1	1	3
877	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	0	1	1	1	3
878	PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE	1	1	1	1	4
879	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	0	1	1	1	3
880	PENGADILAN TINGGI AMBON	1	1	1	1	4
881	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	1	1	0	1	3
882	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	0	1	1	1	3
883	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1	1	0	1	3
884	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	1	1	0	1	3
885	PENGADILAN TINGGI BANTEN	0	1	1	1	3
886	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	1	1	0	1	3
887	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	1	1	0	1	3
888	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	1	1	1	1	4
889	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	0	1	1	1	3
890	PENGADILAN TINGGI JAMBI	1	1	0	1	3
891	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	1	1	1	1	4
892	PENGADILAN TINGGI KENDARI	1	1	1	1	4
893	PENGADILAN TINGGI KUPANG	1	1	1	1	4
894	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	1	1	1	1	4
895	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	1	1	1	1	4
896	PENGADILAN TINGGI MANADO	1	1	1	1	4
897	PENGADILAN TINGGI MATARAM	1	0	1	1	3
898	PENGADILAN TINGGI MEDAN	1	1	0	1	3
899	PENGADILAN TINGGI PADANG	1	1	0	1	3
900	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1	0	1	1	3
901	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	1	1	0	1	3
902	PENGADILAN TINGGI PALU	1	1	1	1	4
903	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1	1	0	1	3
904	PENGADILAN TINGGI RIAU	1	1	0	1	3
905	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	1	1	1	1	4
906	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	0	1	1	1	3
907	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	0	1	1	1	3
908	PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG	1	1	0	1	3

NO	SATKER	JABATAN				JUMLAH
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	PENGELOLA PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7
909	PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA	0	1	0	0	1
910	PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR	1	3	1	1	6
911	PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN	0	1	0	0	1
912	PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA	0	2	0	0	2
913	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	0	1	1	1	3
JUMLAH		303	1540	302	1192	3337